

individu dapat diatasi dengan adanya fitur-fitur seperti panggilan video atau video call.¹

Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan hukum. Beberapa masalah yang timbul akibat perjudian termasuk adanya kecanduan di mana orang tidak dapat menghentikan kegiatan judi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta. Agama dan hukum tidak mengizinkan praktik perjudian karena tidak memberikan manfaat tetapi hanya menyebabkan penderitaan dan kesulitan yang lebih besar. Dalam masyarakat, perjudian dianggap sebagai bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan dalam mekanisme dan variasi jenis kejahatan seiring dengan perkembangan zaman. Meskipun awalnya diatur sebagai pelanggaran dalam Pasal 542 KUHP, peraturan berubah sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) dari UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang kini diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 303 KUHP.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi yang cepat, praktik berjudi telah beralih ke platform online yang lebih praktis dan aman. Fenomena judi online yang sedang populer saat ini, terutama judi slot online, banyak ditemui di kalangan masyarakat melalui warung internet atau menggunakan laptop serta smartphone. Salah satu keunggulan dari judi online adalah kemampuannya untuk dimainkan kapan saja dan di mana saja, karena bandar-bandar judi online

Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, *“Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008*

beroperasi secara online selama 24 jam. Transaksi pembayaran juga dilakukan secara online melalui M-Banking. Pelaku judi online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat untuk berjudi secara modern. Dibandingkan dengan judi konvensional, judi online menawarkan keuntungan yang lebih besar karena dapat diakses melalui jaringan komputer yang luas.

Dalam hal hukum, kegiatan perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE yang mengancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah bagi pihak yang dengan sengaja menyebarkan atau memudahkan akses ke perjudian online. Pasal 303 bis KUHP juga mengancam para pemain judi online dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal 10 juta rupiah.

Penggunaan judi online di Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun pemerintah Indonesia melarang segala bentuk perjudian kecuali untuk beberapa jenis tertentu seperti lotre dan pacuan kuda yang diatur secara ketat, situs-situs judi online yang beroperasi dari luar negeri tetap dapat diakses dengan relatif mudah oleh warga Indonesia melalui internet. Fenomena ini memunculkan berbagai perdebatan dan kontroversi di antara masyarakat, pemerintah, dan para ahli.²

² Arisanti, Septiana H.(2009) ,*Upaya Polri Dalam Mengungkap Tindak Pidana perjudian dikalangan Masyarakat*

Dari satu sisi, ada kekhawatiran tentang dampak sosial dan ekonomi negatif yang ditimbulkan oleh judi online. Misalnya, ada risiko penyalahgunaan perjudian oleh remaja yang dapat mengganggu pendidikan dan perkembangan mereka. Selain itu, masalah keuangan dalam rumah tangga dapat muncul ketika seseorang terlibat dalam praktik perjudian yang tidak terkontrol. Di sisi lain, ada pula kekhawatiran tentang meningkatnya perjudian ilegal yang sulit untuk ditangani oleh pihak berwenang, karena banyaknya situs judi online yang beroperasi di luar yurisdiksi Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi masalah ini dengan memblokir akses ke situs-situs judi online yang tidak memiliki izin resmi. Namun, upaya ini seringkali tidak efektif karena pengguna dapat menggunakan teknologi seperti VPN untuk menghindari pemblokiran tersebut. Selain itu, tantangan utama lainnya adalah kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap individu yang terlibat dalam perjudian online.

Secara keseluruhan, isu perjudian online di Indonesia mencerminkan dilema antara kemajuan teknologi yang memungkinkan akses mudah ke perjudian daring dan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatifnya. Diskusi terus berlanjut tentang cara terbaik untuk mengatur dan mengelola perjudian online agar dapat meminimalkan risiko sosial dan ekonomi yang terkait,

sambil tetap mempertimbangkan hak akses dan kebebasan individu dalam lingkungan digital yang terus berkembang pesat.³

Dalam praktek hukum di Indonesia, kasus-kasus terkait perjudian online semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah penangkapan dan penahanan terdakwa atas dugaan kejahatan terkait perjudian online. Dalam konteks ini, peran advokat dari DPC POSBAKUMADIN SURABAYA menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak terdakwa selama proses hukum. Kasus perjudian online sering kali melibatkan penangkapan terdakwa oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian. Penangkapan ini biasanya didasarkan pada bukti awal atau laporan dari masyarakat yang mengindikasikan adanya kegiatan perjudian ilegal melalui platform online. Advokat dari DPC POSBAKUMADIN SURABAYA bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa sejak awal proses hukum. Mereka akan melakukan konsultasi dengan terdakwa untuk memahami kasusnya, mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, dan mempersiapkan strategi hukum yang tepat untuk memperoleh keadilan bagi kliennya.

Prosedur eksepsi merupakan mekanisme hukum yang digunakan oleh advokat untuk menanggapi penahanan terdakwa secara hukum. Melalui prosedur ini, advokat dapat mengajukan keberatan terhadap penahanan kliennya jika

Fatimah, S., & Taun, T. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 3224-3231.

dianggap tidak sah atau tidak berdasar. Hal ini meliputi pemeriksaan formil dan materil terhadap surat penangkapan dan penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang. Kasus-kasus perjudian online sering kali melibatkan tantangan hukum yang kompleks, termasuk interpretasi atas undang-undang yang berlaku terkait dengan perjudian dan teknologi informasi. Advokat dari DPC POSBAKUMADIN SURABAYA memiliki pemahaman mendalam terhadap regulasi yang relevan serta mampu menghadapi berbagai argumen dari jaksa penuntut dalam sidang.

Proses hukum yang adil adalah hak setiap warga negara, termasuk terdakwa dalam kasus-kasus perjudian online. Advokat dari DPC POSBAKUMADIN SURABAYA bertekad untuk memastikan bahwa klien tidak hanya mendapatkan perlakuan yang adil, tetapi juga mendapat kesempatan untuk membuktikan diri dan mempertahankan hak asasinya sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu penulis mengangkat judul: **“PROSEDUR PENGAJUAN EKSEPSI DALAM PENAHANAN TERDAKWA KASUS JUDI ONLINE OLEH ADVOKAT POS BANTUAN HUKUM DEWAN PIMPINAN CABANG SURABAYA”**.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari Magang MBKM ini adalah agar penulis mengetahui dan memahami prosedur pengajuan eksepsi dalam penahanan terdakwa kasus judi online oleh advokat DPC POSBAKUMADIN Surabaya

1.2.1 Manfaat Prakter Magang MBKM

1. Bagi Penulis

Meningkatkan kemampuan untuk menganalisis prosedur pengajuan eksepsi dalam penahanan terdakwa kasus judi online oleh advokat DPC POSBAKUMADIN SURABAYA. Sambil mengasah keterampilan baik soft skill maupun hard skill, penulis mengembangkan wawasan, kompetensi, dan meningkatkan kepercayaan diri. Pengalaman ini juga memberikan pemahaman tentang struktur organisasi dan fungsi masing-masing bagian di dunia kerja.

2. Bagi Instansi

- a. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang melakukan praktek Magang MBKM pada DPC POSBAKUMADIN SURABAYA.
- b. Dapat bertukar ilmu dengan mahasiswa di luar Univertas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang

melakukan praktek Magang MBKM pada DPC POSBAKUMADIN SURABAYA.

- c. Membantu instansi DPC POSBAKUMADIN SURABAYA dalam segala proses, mulai dari admisnistrasi, pembuatan arsip maupun proses dalam ruang lingkup hukum lainnya.

3. Bagi Fakultas

- a. Untuk menambah kontribusi bahan baca di perpustakaan
- b. Untuk mengukur atau mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan langsung teori yang didapat dari fakultas di dalam ruang lingkup praktek lapangan.
- c. Dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman praktek kerja secara langung atau Magang MBKM

1.3 Tempat dan Waktu Magang MBKM

Lokasi Magang MBKM yang dilakukan oleh Penulis beralamat di Ruko Landmark Kayoon Nomor 38-40, Blok A3, Kecamatan Genteng, Kelurahan Embong Kaliasin, Surabaya, Jawa Timur (DPC POSBAKUMADIN SURABAYA).

1.4 Gambaran Instansi Magang

a. Sejarah POSBAKUMADIN DPC Surabaya

POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Surabaya adalah salah satu lembaga yang berdedikasi